



GUBERNUR SUMATERA UTARA
INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/2/INST/2021
TENTANG

PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM
RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat.

Bahwa sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 angka kematian (*Case Fatality Rate/CFR*) masih di atas rata-rata Nasional yaitu 3,6 % (tiga koma enam persen) dan *Positivity Rate* masing tinggi, di atas 7,2 % (tujuh koma dua persen).

Untuk itu masih diperlukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi *COVID-19*, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur serta mengaktifkan posko-posko Satgas sampai ditingkat RT/RW, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota se Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terdiri dari:

- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50 % (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. melakukan ...

c. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

1. kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 50 % (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, restoran, cafe, kuliner malam sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 3. pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, spa (sante par aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan dan lain-lain) sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- d. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. mengijinkan tempat ibadah untuk digunakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengijinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta diupayakan dilakukan secara daring/online.

KEDUA : Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

KETIGA : Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina), mengaktifkan dan menambah tempat isolasi khusus/karantina, serta pengawasan dengan ketat isolasi mandiri.


KEEMPAT : Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, secara berkala, harian, mingguan, untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

KELIMA ...

- KELIMA** : Mengoptimalkan kembali Posko Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan RT/RW. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
- KEENAM** : Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia). Jika diperlukan dalam upaya pencegahan dapat dilakukan tracing melalui pemeriksaan Swab Antigen oleh Satgas Penanganan COVID-19 Daerah.
- KETUJUH** : Memastikan bahwa semua tempat kegiatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KESATU di atas, penerapan protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan 14 Pebruari 2021.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Pebruari 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan R.I.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R.I.
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I.
5. Menteri Kesehatan R.I.
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu.
8. Pangdam I/BB.
9. Kapolda Sumatera Utara.
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.